

Efektivitas Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Melalui Aplikasi E-Katalog LKPP pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI

Rohman Pangkalandari ^{1*}, Muhammad As'Ad ²

^{1,2} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹ pangkalandari@gmail.com, ² muhas72@gmail.com

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

LKPP e-Catalog;
Electronic Procurement;
Effectiveness;
Transparency;
Efficiency;

This study analyzes the effectiveness of the electronic procurement process of government goods and services through the LKPP e-Catalog system at the Head Office of the Directorate General of Treasury of the Ministry of Finance using the theory of Jones (2017: 379). The results showed that the LKPP e-Catalog has improved procurement efficiency in various aspects, including time, utilization of facilities and infrastructure, resources, and the suitability of goods/services ordered and received. The implementation of this system results in transparency, cost efficiency, and ease of access for various providers, including MSMEs. However, there are several barriers to implementation, such as cybersecurity risks, limited system integration, and organizational resistance to change. To overcome these obstacles, continuous system development, security enhancements, integration with internal platforms, and user training are recommended. Thus, LKPP e-Catalog is expected to further improve the effectiveness and accountability of government procurement of goods and services.

PENDAHULUAN

Pada masa sekarang ini perkembangan teknologi telah sangat maju diberbagai bidang, salah satunya dibidang proses pengadaan barang dan jasa dimana untuk melaksanakan pengadaan yang bersifat terbuka, transparan, efektif dan efisien pada proses pengadaan barang dan jasa pun dilakukan yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kebutuhan penyediaan barang/jasa pemerintah sangatlah beragam, mulai dari kebutuhan pokok seperti kertas dan tinta hingga peralatan teknis yang kompleks. Untuk memenuhi pengadaan barang/jasa tersebut, menuntut adanya metode pengadaan yang efektif untuk memenuhi semua kebutuhan, sehingga diperlukan mekanisme pengadaan yang fleksibel dan adaptif untuk mengatasi berbagai kendala yang mungkin timbul. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik yang merupakan salah satu ciri penting Negara Demokratis yang menjunjung tinggi Kedaulatan Rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang telah maju pesat, proses birokrasi untuk untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa pun harus semakin canggih. Salah satunya adalah dengan adanya Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Melalui Aplikasi E-Katalog LKPP yang digunakan untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Dimana sebelum adanya era teknologi yang maju, pengadaan barang dan jasa di semua sektor pemerintah dilakukan secara konvensional. Sistem pengadaan barang/jasa konvensional sudah tentu memiliki banyak kekurangan. Mulai dari proses yang membutuhkan waktu panjang hingga pendataan kebutuhan barang yang salah sangat mungkin terjadi. Namun, ketika teknologi informasi sudah semakin maju, kesalahan tersebut bisa diminimalisasi dengan adanya proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

Pada prinsipnya, proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik melalui aplikasi e-katalog LKPP adalah salah satu metode pengadaan barang atau jasa secara elektronik melalui aplikasi berbasis internet dimana bisa diakses oleh semua calon penyedia atau pemasok. Tujuan proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik melalui aplikasi e-katalog LKPP tentu untuk

mempermudah dan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa. Dengan menggunakan sistem ini, kerja instansi pemerintah lebih cepat, sesuai sasaran, dan dapat menghemat anggaran. Sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif sangat penting dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sistem pengadaan yang buruk akan mengakibatkan biaya-biaya yang tinggi bagi pemerintah maupun masyarakat. Sistem yang demikian akan mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan proyek yang selanjutnya memperbesar biaya, menghasilkan kinerja proyek yang buruk dan tertundanya manfaat proyek yang dirasakan oleh masyarakat.

Ketidakberesan sistem pengadaan juga bisa membuka peluang untuk korupsi, menimbulkan banyak protes dan kecurigaan terhadap integritas proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta adanya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah diperlukan adanya keterbukaan, bebas bagi siapa saja untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa, namun harus memenuhi tata cara dan tata tertib dalam perundang-undangan yang berlaku.

Sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik melalui Aplikasi e-katalog LKPP di Indonesia pada perspektif pemerintah yang dipercaya sebagai alat ukur atau instrument untuk mewujudkan good governance dan pelayanan publik karena akan meningkatkan efisiensi biaya, efektifitas, waktu siklus yang lebih cepat, meningkatkan transparansi paket yang dilaksanakan, menyediakan monitoring yang lebih baik, meningkatkan persaingan yang sehat, dan dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Sementara penggunaan sistem pengadaan yang terdahulu melalui mekanisme tender memiliki sejumlah kelemahan yang dapat mempengaruhi efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang merupakan instansi pemerintahan dalam pengadaan barang dan jasa telah melaksanakan dengan metode pengadaan langsung menggunakan aplikasi e-katalog LKPP. Sistem aplikasi ini adalah tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem aplikasi yang bisa diakses oleh instansi pemerintah dan juga masyarakat umum. Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 Tentang E-katalog. E-katalog atau e-catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa pemerintah. Hal ini diperkuat juga melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik.

Tabel 1. Data Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Aplikasi E-Katalog LKPP di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Tahun 2024

No	ID PAKET	NAMA PAKET	NAMA PENYEDIA	HARGA
1	P00-P2409-10502891	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Untuk Keperluan Kantor Vertikal Djpb Ta.2024 (G2)	Pt. Hasbana Karya Cipta	1,694,857,650
2	PE2-P2409-10499828	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Untuk Keperluan Kantor Vertikal Djpb Ta.2024 (Ra)	Pt. Datascrip	890,000,000
3	LTN-P2409-10476839	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Untuk Keperluan Kantor Vertikal Djpb Ta.2024 (Av)	Pt. Hasbana Karya Cipta	1,232,866,280
4	LTN-P2409-10466203	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Untuk Keperluan Kantor Vertikal Djpb Ta.2024 (St)	Mitrates Data Securindo	409,035,000
5	LTN-P2409-10460808	Pengadaan 25 (Dua Puluh Lima) Unit Perangkat Pendingin Ruangan (AC) Pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan	PT. Hasbana Karya Cipta	519,000,000
6	LTN-P2409-10460722	Pengadaan 19 (Sembilan Belas) Unit UPS 10 KVA Untuk Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan	PT. Pratama Datamaksima	1,539,000,000

7	LTN-P2409-10388637	Pengadaan Perangkat Pendingin Ruangan Pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan	PT. Hasbana Karya Cipta	567,000,000
8	LTN-P2408-10197519	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Untuk Keperluan Kantor Vertikal Djpb Ta.2024 (Mm)	Mitrataech Data Securindo	744,276,000
9	6R1-P2408-10056006	Pengadaan Seragam Pegawai	PT. Binabusana Internusa	345,360,000
10	POR-P2407-10004459	Pengadaan Seragam Pegawai	Mitra Kreasi Garmen	597,768,000
11	LTN-P2407-10000556	Pembelian Perangkat Pendingin Ruangan Pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan	PT. Hasbana Karya Cipta	147,250,000
12	LTN-P2407-9893224	Pengadaan Supplies Komputer Untuk Keperluan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan	Pt Megatech Jaya Nusantara	180,281,000
13	6R1-P2407-9846381	Pengadaan Seragam Petugas Kebersihan, Resepsionis, Sopir Pada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan	Crysber Bahtera Sentosa	366,240,000
14	LTN-P2406-9704737	Pengadaan Sparepart Dan Perlengkapan Pendukung Perangkat TIK Direktorat SITP	Delta Klik Indonesia	66,955,000
15	KB2-P2406-9532827	Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan Kanwil Djpb TA 2024	PT. Astrido Jaya Mobilindo	540,400,000
16	LTN-P2406-9496374	Pengadaan Supplies Komputer Untuk Keperluan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan	Pt Megatech Jaya Nusantara	178,216,000
17	TD4-P2405-9436080	Pengadaan ATK Untuk Keperluan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan	CV. Sukma Jaya Baru	45,206,000
18	POR-P2405-9378114	Pengadaan Seragam Pegawai	Mitra Kreasi Garmen	120,282,100
19	KB2-P2405-9353942	Pengadaan Kendaraan Dinas Direktorat Jenderal Perbendaharaan Ta 2024	Pt. Astrido Jaya Mobilindo	1,621,200,000
20	KB2-P2405-9353919	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Ta 2024	Pt. Astrido Jaya Mobilindo	401,300,000
21	KB2-P2405-9353834	Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan Kantor Wilayah Djpb TA 2024	PT. Astrido Jaya Mobilindo	3,782,800,000
22	LTN-P2405-9318752	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Untuk Keperluan Kantor Pusat Djpb Ta.2024 (Mm)	Mitrataech Data Securindo	495,536,000
23	AC0-P2404-9106059	Pencetakan Majalah Treasury Indonesia Volume 1 Tahun 2024	Maju Selaras Network	187,500,000
24	LTN-P2404-9011622	Pengadaan Ups 10 Kva Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Pt. Pratama Datamaksima	769,350,000
25	LTN-P2404-8984400	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Untuk Keperluan Kantor Pusat Djpb Ta.2023..	Air Mas Perkasa	400,000,000
26	5J0-P2403-8896899	Pengadaan ATK Berupa Kardus Arsip Untuk Keperluan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan	CV. Sukma Jaya Baru	91,020,000
27	LTN-P2403-8823354	Pengadaan ATK Berupa Kardus Dokumen Untuk Keperluan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan	PT Megatech Jaya Nusantara	166,846,000
28	POR-P2402-8580229	Pengadaan Seragam Pegawai	Mitra Kreasi Garmen	669,621,700

29	LTN-P2402-8536563	Pengadaan Supplies Komputer Untuk Keperluan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan	Pt Megatech Jaya Nusantara	180,386,000
30	5J0-P2402-8534329	Pengadaan Supplies Komputer Untuk Keperluan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan	Brava Inti Mastaka	148,024,000
31	LTN-P2402-8533012	Pengadaan Perangkat Pendingin Ruangan (AC) Pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan	PT. Hasbana Karya Cipta	837,000,000
32	LTN-P2402-8532766	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Kantor Pusat Djpb TA 2024 (PAKET 2)	Mitrataech Data Securindo	676,741,000
33	LTN-P2401-8438618	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Kantor Pusat Djpb Ta.2024 (Vw)	Mitrataech Data Securindo	290,400,000
34	LTN-P2401-8431507	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Kantor Pusat Djpb Ta.2024 (Vw)	Air Mas Perkasa	541,000,000
35	P00-P2401-8413953	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Kantor Pusat Djpb Ta.2024 (G)	Pt. Hasbana Karya Cipta	1,752,832,950
36	KB2-P2401-8378293	Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan Kanwil Djpb TA 2024	PT. Astrido Jaya Mobilindo	6,412,800,000
37	KB2-P2401-8377453	Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan KPPN TA 2024	PT. Astrido Jaya Mobilindo	8,026,000,000
38	BED-P2401-8375360	Sewa Tanaman Dalam Gedung	PT. Vitara Anugrah Mandiri	229,473,000
39	LPL-P2401-8374271	Pengadaan Jasa Monitoring dan Analisis Media Direktorat Jenderal Perbendaharaan	PT. Indonesia Indikator	82,500,000
40	BED-P2401-8364911	Pengadaan tanaman dalam ruangan	PT. Vitara Anugrah Mandiri	193,713,000
TOTAL				38,140,036,680

(Sumber : Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan 2024)

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan pada Tahun 2024 dalam pengadaan barang dan jasa telah menggunakan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui aplikasi e-katalog LKPP. Dengan jumlah transaksi dan anggaran yang besar, maka pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui mekanisme sistem pengadaan secara elektronik telah mampu menjadi terobosan yang dapat menjadikan pengadaan barang dan jasa menjadi kredibel dan akuntabel. Pelaksanaan pengadaan secara elektronik melalui aplikasi e-katalog dalam menerapkan prinsip, efisien, efektif, transparan/terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.01/2018 tentang Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik pada Pasal 2 di Kementerian Keuangan. Disamping itu tidak adanya instansi tunggal yang berwenang untuk merumuskan kebijakan pengadaan pemerintah, memantau pelaksanaannya, dan memastikan sanksi serta mekanisme penegakan hukum dapat diterapkan dengan tegas.

Pada tahun 2024 proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menggunakan sistem pengadaan secara elektronik melalui aplikasi e-katalog LKPP sehingga terdapat peningkatan transaksi yang signifikan dengan jumlah pengadaan dari sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket pengadaan menjadi 52 (lima puluh dua) paket pengadaan secara elektronik.

Namun, dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik melalui aplikasi e-katalog LKPP ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pejabat pengadaan barang dan jasa. Permasalahan Pertama adalah permasalahan yang sering dihadapi oleh para pejabat pengadaan maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saat menggunakan aplikasi e-katalog LKPP adalah harga

yang tercantum belum termasuk biaya pengiriman. Informasi ini baru diketahui pada saat sudah memasukkan pesanan di aplikasi. Hal ini yang menyebabkan pejabat pengadaan barang dan jasa melakukan pembatalan pembelian. Selain dengan pembatalan pembelian, ada juga satuan kerja harus melakukan revisi anggaran untuk mengakomodasi biaya pengiriman tersebut. Permasalahan Kedua belum semua barang dan jasa yang diperlukan dapat disediakan secara elektronik melalui aplikasi e-katalog LKPP. Adanya kebutuhan baik yang rutin maupun insidental pada satuan kerja belum semuanya tersedia di aplikasi e-katalog LKPP. Akibatnya pejabat pengadaan barang dan jasa akan melakukan pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme yang lain misalnya pelelangan, pengadaan langsung ataupun pembelian langsung. Ketiga belum semua barang dan jasa yang tersedia pada aplikasi e-katalog LKPP telah mempunyai sertifikat TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang disyaratkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Ketiga permasalahan tersebut menjadi bahan awal bagi peneliti untuk menganalisis lebih lanjut mengenai permasalahan yang terjadi seputar penggunaan aplikasi e-katalog LKPP pada pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : Menurut Pohan (2014:84): “Administrasi adalah seluruh kegiatan yang dilakukan melalui kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu organisasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”
2. **Administrasi Publik** : Menurut Chandler dan Plano (Em.Lukman Hakim, 2011: 20): “Administrasi Publik adalah proses sumber daya dan personel publik yang dikoordinasi dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.”
3. **Efektivitas** : Jones (2017) menjelaskan bahwa efektivitas sistem diukur dari aspek efisiensi waktu, transparansi, serta biaya.
4. **Keamanan Pengadaan Elektronik** : Carter et al. (2018) menyoroti pentingnya keamanan siber dalam sistem pengadaan elektronik, termasuk penerapan teknologi enkripsi dan autentikasi.
5. **Pengadaan Barang dan Jasa** : Menurut Marbun (2018:35) mengemukakan pendapatnya bahwa Pengadaan barang dan jasa adalah upaya mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan dilakukan atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis (the system of thought), mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku.

Kerangka Konseptual

Efektif merupakan kata sifat yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Sesuatu yang efektif berarti dapat menghasilkan tujuan yang diharapkan atau memberikan dampak yang signifikan. Sedangkan Efektivitas adalah kata benda yang merujuk pada tingkat keberhasilan atau kemampuan sesuatu dalam mencapai sebuah tujuan. Efektivitas merupakan ukuran sejauh mana suatu tindakan, metode, atau program mencapai hasil yang diinginkan. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau e-procurement merupakan suatu proses pengadaan yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Pengadaan yang efektif dimana proses pengadaan yang berhasil mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan dengan kualitas yang baik, harga yang kompetitif, dan dalam waktu yang tepat. Sedangkan efektivitas pengadaan yang merupakan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan pengadaan, seperti penghematan biaya, peningkatan kualitas barang atau jasa, dan kepuasan pengguna. Pengadaan barang/jasa pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh pejabat Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Setiap instansi pemerintah pasti membutuhkan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan setiap operasionalnya yang diperoleh melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan negara. Salah satu perwujudannya adalah dengan pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, yaitu pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan

menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk dapat berjalan secara efektif maka proses pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik melalui aplikasi e-katalog LKPP harus diusahakan dengan menggunakan data yang lengkap untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan. Manfaat positif pengadaan barang dan jasa dalam menggunakan aplikasi e-katalog LKPP adalah sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) bisa membuat pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dapat berjalan secara transparan, adil dan menciptakan persaingan yang sehat dan mendorong pemasok atau vendor untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa publik.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penilaian efektivitas yang di kemukakan oleh Jones (2017:379) sebagai berikut:

1. Proses: Apakah pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menggunakan aplikasi e-katalog LKPP sesuai dengan tugas dan fungsi pejabat pengadaan dalam proses pengadaannya dalam mewujudkan efektivitas pengadaan barang dan jasa.
2. Penilaian Dampak: Apakah penggunaan aplikasi e-katalog LKPP efektif dalam pencapaian tujuan yang diinginkan, dapatkan hasil-hasil dijelaskan oleh beberapa proses alternatif diluar program, apakah program-program memiliki dampak yang tidak diinginkan.

Dalam penelitian proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang harus dilakukan oleh pejabat pengadaan barang dan jasa dan pejabat pembuat komitmen adalah sebagai berikut:

1. Paket pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah tersedia alokasi anggarannya;
2. Paket pengadaan sudah direkam, diumumkan dan mendapatkan nomor identitas paket pengadaan pada aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan (SiRUP) yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
3. Paket pengadaan barang dan jasa yang menjadi konsentrasi pada proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada aplikasi e-katalog LKPP.

METODE PENELITIAN

a. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam tanpa manipulasi terhadap objek penelitian. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara induktif untuk memahami makna yang terkandung dalam fenomena yang diteliti.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat. Penelitian ini memfokuskan pada efektivitas penggunaan aplikasi e-Katalog LKPP dalam pengadaan barang dan jasa di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

b. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah efektivitas penggunaan aplikasi e-Katalog LKPP dalam proses pengadaan barang dan jasa. Efektivitas ini dievaluasi berdasarkan dua dimensi utama menurut teori Jones (2017), yaitu:

- a. Proses, yaitu dengan menilai kesesuaian pelaksanaan pengadaan dengan prosedur yang telah ditetapkan.

- b. Penilaian Dampak, dengan mengukur dampak penggunaan aplikasi terhadap pencapaian tujuan serta kemungkinan adanya dampak yang tidak diinginkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, sebuah lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan perbendaharaan negara. Direktorat ini memiliki misi memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif melalui berbagai kebijakan dan sistem pengelolaan keuangan yang inovatif. Salah satu inovasi yang diterapkan adalah penggunaan aplikasi e-Katalog LKPP dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Hasil

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, penerapan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik melalui aplikasi E-Katalog LKPP menunjukkan beberapa hasil sebagai berikut:

1. Efisiensi Waktu

Proses pengadaan barang/jasa yang sebelumnya memakan waktu hingga 14 hari kerja, setelah menggunakan E-Katalog dapat diselesaikan dalam 5-7 hari kerja. Pemilihan vendor dan penetapan pemenang lebih cepat karena tersedianya daftar penyedia terdaftar di sistem.

2. Transparansi dan Akuntabilitas

Seluruh proses pengadaan dapat dilacak (trackable) melalui sistem, mengurangi praktik KKN. Harga barang/jasa telah terstandarisasi dalam E-Katalog, sehingga meminimalisir markup harga.

3. Penghematan Anggaran

Terjadi efisiensi biaya sebesar 10-15% dibandingkan metode pengadaan konvensional. Penghilangan biaya administrasi fisik karena proses dilakukan secara digital.

Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Melalui E-Katalog LKPP

Penelitian ini meneliti efektivitas proses pengadaan barang dan jasa dengan sistem e-Katalog LKPP, yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengamati bagaimana sistem e-Katalog LKPP mampu mempercepat dan menyederhanakan proses pengadaan di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

1. Unsur Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, efektivitas pengadaan barang dan jasa melalui e-Katalog LKPP dianalisis menggunakan empat unsur utama:

- a. Unsur Waktu: Penggunaan e-Katalog LKPP memungkinkan penyelesaian pengadaan dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan metode konvensional. Proses ini mempercepat pencairan dana dan distribusi barang serta jasa.
- b. Unsur Pemanfaatan Sarana dan Prasarana: Dengan adanya sistem digital, kebutuhan akan dokumentasi fisik berkurang secara signifikan. Sistem ini juga terintegrasi dengan berbagai aplikasi perkantoran untuk memudahkan administrasi.
- c. Unsur Sumber Daya: Efektivitas pengadaan juga didukung oleh kesiapan sumber daya manusia yang memahami teknologi e-Katalog. Pelatihan yang berkelanjutan bagi para pengguna sistem berkontribusi pada kelancaran implementasi.
- d. Unsur Kesesuaian: Sistem e-Katalog memastikan bahwa barang dan jasa yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan atau penyimpangan dalam proses pengadaan.

2. Dampak Implementasi E-Katalog LKPP

Penerapan sistem e-Katalog LKPP memiliki dampak positif bagi pemerintah dan vendor penyedia barang dan jasa:

- a. Bagi Pemerintah: Proses pengadaan menjadi lebih transparan dan akuntabel, mengurangi potensi korupsi dan inefisiensi.
- b. Bagi Vendor: Memberikan peluang yang lebih luas bagi penyedia barang dan jasa untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah dengan sistem yang lebih terbuka dan adil.

Pembahasan

Sistem E-Katalog LKPP terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan penghematan anggaran di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Suryanto dkk., 2022) yang menyatakan bahwa pengadaan elektronik mempercepat proses lelang dan mengurangi intervensi manusia. Namun, beberapa tantangan seperti keterlambatan penyedia dan kurangnya literasi digital perlu diatasi melalui:

- a. Sosialisasi lebih intensif bagi pengguna dan penyedia barang/jasa.
- b. Peningkatan pengawasan terhadap kinerja vendor di E-Katalog.
- c. Optimalisasi sistem untuk meminimalisir error teknis.

Dengan demikian, E-Katalog LKPP telah memberikan dampak positif, namun perlu penyempurnaan agar efektivitasnya semakin maksimal.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem e-Katalog LKPP di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI telah berjalan dengan efektif. Sistem ini mampu meningkatkan efisiensi waktu, memaksimalkan penggunaan sumber daya, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan terus melakukan perbaikan sistem dan peningkatan kapasitas SDM, efektivitas pengadaan melalui e-Katalog dapat semakin optimal di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah, Djam'an Satori. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Ade. Maman 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Adrian Sutedi, 2018. *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya*, Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Creswell, John W. 2018. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.
- Duncan (Steers 2015:53) *Manajemen efektivitas (Dalam Perspektif Pelayanan Publik)*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hendryadi, Tricahyadinata, I., & Zannati, R. 2019. *Metode Penelitian: Pedoman Penelitian Bisnis dan Akademik*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Manajemen dan Publikasi Imperium (LPMP Imperium).
- Jones (2017:379) *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan (terjemahan)* Edisi ke empat. Kencana Press. Jakarta.
- Kettner, Moroney dan Martin (2018:262) *Designing and Managing Programs An Effectiveness-Based Approach*.
- Marbun, Rocky. 2018. *Tanya Jawab Seputar Tata Cara Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah*. Jakarta: PT. Visimedia.
- Mardiasmo.2016. *Efisiensi dan Efektifitas*. Jakarta: CV. Andy.

- Moleong, J. Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J., 2013, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Dedy, 2016, *Administrasi Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Pasolong Harbani 2017. *Teori Administrasi Publik*, Bandung CV. Alfabeta. Siahaya. 2019. *Manajemen Pengadaan Barang/Jasa*, Bogor: PT.INMEDIA.
- Rosenbloom, David H. dkk. 2015. *Public Administration. Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector. Eighth Edition*. New York: McGraw-Hill International Edition.
- Rukin. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia.
- Siregar. Helly Aroza, 2016. *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Dengan Belanja Modal*. Jurnal Tranparansi Ilmiah.
- Sudarmayanti (2015) *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja* Bandung: Mandar Maju.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta.) Cet 4, Hlm. 102 Taufiqurakhman, *kebijakan publik*, (Jakarta: penerbit, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Moestopo Beragama pers). Hlm 4-5.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Sutha, Diah Wijayanti. 2018. *Administrasi Perkantoran*. Sidoarjo: PT. Indomedia. Pustaka.
- Tangkilisan (2015:141), *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada.
- Willem. Siahaya, 2017. *Manajemen Pengadaan Procurement. Management*. Bandung: CV. Alfabeta.
- William H. Leffingwell and Edwin M. Robinson, 2019. *Texbook of Administrations*, New York, McGraw-Hill Book Company.